

## KONSEPSI MUSYAWARAH DALAM *SERAT KANCIL KRIDHAMARTANA* JILID I SEBAGAI SUMBER NILAI BAGI PERILAKU BERDEMOKRASI PENYELENGGARA NEGARA

Emi Setyaningsih<sup>1</sup>, Prisca Kiki Wulandari<sup>2</sup>, Destriana Saraswati<sup>1</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pusat Matakuliah Pengembangan Kepribadian (PMPK) Universitas Brawijaya

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

Email: emi\_sophia@ub.ac.id

Informasi Artikel:

Dikirim: (30 Maret 2021); Direvisi: (30 April 2021); Diterima: (5 Mei 2021)

Publish (7 Mei 2021)

**Abstrak:** *Konsepsi Musyawarah dalam Serat Kancil Kridhamartana Jilid I sebagai Sumber Nilai Bagi Perilaku Berdemokrasi Penyelenggara Negara.* Penelitian ini bermaksud untuk menggali nilai musyawarah yang terdapat dalam *Serat Kancil Kridhamartana* jilid I. *Serat Kancil Kridhamartana* jilid I ini adalah salah satu versi naskah *Serat Kancil* yang ditulis dalam lingkup tradisi (keraton) Pakualaman. Melalui penelusuran yang lebih mendalam terhadap naskah ini setidaknya kita menemukan salah satu nilai luhur budaya bangsa, yakni musyawarah mufakat yang bisa dijadikan landasan perilaku berdemokrasi aparatur penyelenggara negara. Mengingat hingga saat ini, perilaku berdemokrasi aparatur penyelenggara kita masih jauh dari nilai-nilai demokrasi yang substansial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan model penelitian filsafat yaitu historis faktual mengenai naskah. Pada proses analisis data penelitian, peneliti menggunakan unsur-unsur metodis, yaitu interpretasi, idealisme, komparasi, dan deskripsi. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa *Serat Kancil Kridhamartana* jilid I mengandung nilai musyawarah mufakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Permusyawaratan sebagai sebuah nilai sekaligus prosedur ternyata tidak berdiri sendiri melainkan terkait dengan nilai-nilai yang lain, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai musyawarah yang terdapat dalam *Serat Kancil Kridhamartana* jilid I ini sangat relevan sebagai fundamen etik untuk mewujudkan perilaku berdemokrasi penyelenggara negara yang lebih baik.

**Kata kunci:** nilai, musyawarah, demokrasi

**Abstract:** *The Conception of Musyawarah in Serat Kancil Kridhamarta Volume 1 as A Source of Value for Democratic Behavior of State Administrators.* This research is aimed to explore on the value of musyawarah (deliberation) in *Serat Kancil Kridhamartana* volume I. This *Serat* is a version of the *Serat Kancil* manuscript written in the scope of Pakualaman tradition (palace). Through deeper exploration on this manuscript, at least we can find one of the noble values of our nation's culture, namely musyawarah mufakat (deliberation and consensus) which can be used as a basis for democratic behavior of state administrators. Given that until now, the democratic behavior of our administering apparatus is still far from substantial democratic values. This research is a type of literature research using a philosophical research model, namely historical factual about the text. In the process of analyzing research data, the researcher used methodical elements, namely interpretation, idealism, comparison, and description. The results of this study describe that *Kancil Kridhamartana* volume I contains the value of deliberation and consensus /or to reach a consensus (musyawarah-mufakat) as a guide in solving every problem. Deliberation as a value as well as a procedure does not stand alone but is related to other values, namely the values of divinity, humanity, unity and justice. The values of

*deliberation (musyawarah) contained in Serat Kancil Kridhamartana volume I are very relevant as an ethical foundation for realizing better democratic behavior of state administrators.*

**Key words:** *values, musyawarah, democracy*

## **PENDAHULUAN**

Kehidupan demokrasi pasca Orde Baru memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui kanal organisasi masyarakat, partai politik, maupun gerakan sosial. Akan tetapi, euforia kebebasan beraspirasi tersebut menandai suatu keadaan bahwa demokratisasi yang dijalankan pada era Reformasi tersebut masih bersifat semu, dalam arti sebuah proses demokratisasi yang tanpa arah dan tujuan. Hal tersebut dapat kita lihat dari tolak ukur luaran Reformasi pada saat ini yang masih menerapkan sistem politik yang menganut demokrasi prosedural daripada mengarah secara substansial.

Memasuki era digital ternyata tidak membuat demokrasi di negeri ini menjadi baik tetapi malah semakin gaduh. Media masa digunakan sebagai sarana menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, dan fitnah dalam rangka mewujudkan kepentingan politik golongan tertentu yang membuat kehidupan demokrasi semakin mencemaskan (Subhan, 2019: 79).

Penyelenggaraan negara Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi semakin luntur. Hal memprihatinkan yang pertama adalah soal akuntabilitas

(pertanggungjawaban) dari aparatur negara terhadap rakyat. Akuntabilitas adalah prasyarat yang harus ada dalam sistem demokrasi. Sayangnya para aparatur negara kita yang dipilih melalui mekanisme demokrasi, banyak yang tidak amanah. Alih-alih mau mensejahterakan rakyat seperti janji mereka, mereka justru mengeruk kekayaan negara (korupsi) baik untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Mengingat penyelenggaraan demokrasi yang masih jauh dari harapan maka sudah selayaknya kita perlu kembali menelisik kearifan lokal, menengok jati diri bangsa ini, dan merevitalisasi nilai-nilai yang pernah tumbuh subur dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, yakni dalam hal ini kita memfokuskan pada nilai-nilai musyawarah yang bisa dijadikan landasan etik berdemokrasi bagi penyelenggaraan negara.

“Serat Kancil” adalah salah satu khasanah naskah Nusantara yang menarik untuk diteliti karena sarat akan nilai-nilai luhur yang sangat diperlukan untuk menghadapi permasalahan masyarakat kita pada saat ini. Akan tetapi, kekayaan kearifan lokal Nusantara yang luhur dan sarat akan nilai ini hanya menjadi tradisi lisan dan belum banyak yang mengapresiasinya secara ilmiah. Serat

Kancil memiliki beragam versi, sebagai konsekuensi dari bentuk penulisan budaya lisan (Winsteddt, 1906:61-69). Salah satu versi tertulis dari *Serat Kancil* ditulis oleh Kyai Rangga Amongsastra pada tahun 1822 yang naskahnya lebih terkenal dengan *Serat Kancil Amongsastra* dan dicetak pada 1878. Versi lainnya dikenal dengan *Serat Kancil van Dorp* yang tidak diketahui penulisnya dan kemudian diterbitkan oleh G.C.T. van Dorp di Semarang pada 1871. Buku lainnya adalah *Serat Kancil Salokadarma* karya R.A. Sasraningrat dan *Serat Kancil Kridamartana* yang ditulis oleh R.P. Sasrawijaya (Dipodjojo, 1985: i).

Serat Kancil versi Rangga Amongsastra dan Salokadarma telah beberapa kali diapresiasi. Penelitian dari Setyowati (2006: 88-90) mengetengahkan berbagai nilai-nilai moral yang terkandung dalam serat tersebut. Dengan bantuan teori nilai moral Jawa dan sosiologi sastra, dia menemukan nilai rukun dan hormat yang termasuk nilai Jawa pada *Serat Kancil Salokadarma (SKSD)*. Nilai moral tersebut merupakan respon dari suatu kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa penulisan *SKSD*. Sehingga *SKSD* merupakan suatu kritik sosial yang mempertahankan nilai kejawaannya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

McKean (1971: 83) merasa bahwa Serat Kancil memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan dan politik. Bahkan, dia berasumsi bahwa Kancil dapat

menjadi model yang penting bagi orang-orang Indonesia dan nilai-nilai yang terikat di dalamnya dapat dipahami secara universal. Ada kemungkinan bahwa apa yang dia ungkapkan dapat difalsifikasikan dan dia mengajukan pendekatan struktural untuk menuai nilai-nilai luhur di dalamnya. Senada dengan McKean, Carpenter (1992: 111) juga menyimpulkan bahwa Serat Kancil seringkali memiliki maksud secara eksplisit untuk memberikan gambaran yang ideal pada pendidikan moral anak-anak. Secara universal, cerita binatang juga digunakan untuk mendidik para generasi penerus. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan diri dan berkepribadian yang baik.

## METODE

Objek material penelitian ini adalah Serat Kancil versi Kridhamartana jilid I yang diselidiki sebagai teks filosofis yang memuat hakikat dan nilai musyawarah. Proses penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan yang berkaitan dengan naskah asli, dan manuskrip-manuskrip lain sebagai perbandingan. Pada proses analisis data penelitian, peneliti menggunakan unsur-unsur metodis yaitu, interpretasi, idealisme, komparasi, dan deskripsi. Interpretasi digunakan untuk menyelami, menangkap arti dan nuansa yang ditangkap dari teks. Idealisme digunakan untuk menangkap konsep universal dan ideal dari teks. Komparasi

untuk membandingkan semua manuskrip untuk mendapatkan variasi terjemahan dan analisis. Deskripsi digunakan agar peneliti tidak lepas dari teks naskah, interpolisasi pikiran tidak boleh jauh dari teks (Bakker dan Zubair, 1990: 41-57).

Penelitian mengenai Serat Kancil memang pernah dilakukan oleh beberapa orang, akan tetapi belum ada yang secara komprehensif menganalisis pada aspek nilai musyawarahnya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi musyawarah sebagai fundamen nilai demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini dipandang sangat penting karena bangsa ini sedang mengalami krisis jati diri yang akan berdampak pada kelangsungan hidupnya sebagai sebuah bangsa. Penelitian ini dikembangkan dengan semangat hendak merevitalisasi nilai-nilai demokrasi dalam ranah penyelenggaraan negara melalui apresiasi pada karya lokal yang sarat muatan nilai-nilai musyawarah di tengah praktik berdemokrasi para penyelenggara negara yang menyimpang dari substansi demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konteks Zaman

“Serat” adalah karya sastra yang ditulis oleh pujangga Jawa dalam bentuk tembang-tembang Jawa. “Serat” berisi petunjuk atau nasihat sehari-hari yang

tujuannya adalah mengubah moral dan perilaku manusia menuju tatanan hidup yang luhur pada zamannya dan diyakini masih relevan hingga saat ini (Yuliati, 2019: 278), yakni seperti halnya *Serat Kancil Kridhamartana* ini. Berdasarkan keterangan dari Panti Boedaja bahwa teks *Serat Kancil Kridhamartana* tersebut merupakan hasil karya yang dihasilkan di lingkungan Keraton Pakualaman yang diperkuat adanya *sasmitaning tembang* yang dipakai menurut adat di pura Pakualaman yaitu pada awal tiap *pupuh*, bukan pada *gatra* terakhir *pupuh* sebelumnya (Behrend, 1990:329). *SKKD* merupakan karya RP. Natarata berangka tahun 1901. Raden Panji Natarata ini mengubah versi *Serat Kancil Salokadarma* karya Panji Sasrawijaya yang berangka tahun 1891, sehingga kita dapat menemukan kesamaan cerita antara *SKSD* dan *SKKD*. Serat Kancil ini banyak memuat penjabaran *ngelmu kasampurnan*. Cerita naskah ini berbentuk siklus, dimulai dari awal kehidupan kancil hingga kematiannya. Hal ini sejalan dengan pola pikir masyarakat Jawa dalam memahami hakikat kehidupan yang dikenal dengan istilah *sangkan paraning dumadi* (Ciptoprawiro 1986: 22).

Jika melihat angka tahun penulisan serat ini yaitu sekitar akhir 1800an dan awal 1900an maka hampir keseluruhan pulau Jawa pada masa itu berada di bawah

kekuasaan kolonialisme Belanda. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap sisi kehidupan, termasuk kehidupan politik, masyarakat Jawa dipengaruhi oleh kekuasaan Belanda. Konteks latar kekuasaan kolonial Belanda ini ditunjukkan bagaimana serat ini menyerap beberapa kata-kata Belanda ke dalam bahasa Jawa, seperti kata *landraten* (Jawa) dari kata *landraad* (Belanda), *komingsi* (Jawa) dari *commisie* (Belanda), atau istilah Belanda seperti yang dipakai di serat ini seperti *singaning nedherland* (harimaunya Belanda), *pokrul* (advokat), *lit* (pemimpin), *huk* (belanda), dan *vonis* (Belanda) dan masih banyak lainnya.

Karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap jika dipisahkan dari konteks budaya dan masyarakat yang melingkupinya (Damono, 1979: 5) karena karya sastra sesungguhnya merupakan cerminan masyarakat. Mengingat serat ini sarat nilai-nilai moral maka menurut hemat kami, penulisan Serat Kancil dimaksudkan untuk mengkritisi kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Semisal pada nilai gotong-royong atau persatuan yang bisa kita lihat dalam *pupuh* Asmaradana (2), pada ke-8. Eksplisit di dalam bait-baitnya seolah menyindir atau sebenarnya merupakan kritik terhadap masyarakat Jawa yang sulit sekali bergotong-royong menghadapi Belanda. Malah justru masyarakat Jawa terbelah karena politik adu domba Belanda.

Nilai Ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang menghormati ketuhanan yang lain muncul sebagai *counter* terhadap paham keberagaman yang eksklusif. Saat itu sekitar tahun 1850an hingga 1900an telah mulai muncul Islam yang lebih eksklusif yang menggugat tradisi keagamaan sebelumnya, yakni bernuansa lebih formal. Kelompok baru ini pada tahun-tahun itu muncul dengan pemahaman agama yang lebih menekankan aspek formal-kaku syariat keagamaan namun lupa terhadap dimensi hakikat dan ma'rifat yang lebih substansial dan penting dari agama.

Dalam *Serat Wedhatama* yang dikarang Mangkunegara IV (1979: 19) yang wafat di tahun 1881 disebut terdapat istilah *santri dul* atau *santri brai dul* di daerah Pacitan sepanjang pesisir kidul yang terlalu bersemangat mendesakkan pemahaman fikih-syariat sebagai wacana yang digembor-gemborkan dalam diskursus yang bahkan sudah dalam tahap mencela kelompok lain. Kelompok ini mengabaikan esensi agama sebagai baju yang menghiasi tubuh wadag kita dengan pakaian bernama "akhlak" layaknya diajarkan dalam pemahaman Islam pada dimensi ma'rifat dan hakekat seperti yang diajarkan para wali tanah Jawi dalam bingkai sufisme Islam.

Kelompok khusus ini menyorongkan pemahaman dimensi lahir keislaman, yang kadang juga diselipi

istilah-istilah yang mengeksklusi, sehingga justru membuat konsep ketuhanan mereka menjadi eksklusif dan oleh karenanya melemahkan persatuan rakyat, sehingga tidak bisa bekerjasama untuk melawan penjajah. Sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan juga menjadi pesan yang ingin disampaikan penulis serat ini karena pada saat bangsa ini di bawah kolonialisme memunculkan ketidakadilan hukum dan ekonomi.

Pengaruh Islam (sufisme) juga sangat kental dalam penulisan Serat Kancil. Hal ini nampak dalam *pupuh* Sinom dimana spirit dan nilai ketuhanan yang disampaikan di dalam Serat Kancil ini adalah nilai ketuhanan yang tidak egois, Islam yang menghargai perbedaan agama lain, alias bisa menjadi rahmat bagi semesta. Sebuah konsep bertuhan yang diukur buahnya dalam tindak budi pekerti luhur. Wejangan ini muncul juga karena ingin merespon kegandrungan masyarakat yang berlebihan terhadap agama Islam yang hanya menekankan aspek syariat yang formal dan kaku. Banyak kelompok Islam baru yang muncul pada masa itu yang dengan penafsiran akan Islam yang menekankan aspek syariat formal kaku semata yang variannya begitu beragam sehingga memicu potensi untuk saling menyalahkan aliran yang satu terhadap yang lainnya.

Serat Kancil ini ditulis dalam kultur Islam Jawa (sufisme) yang tidak alergi

terhadap warisan tradisi lama yang dianggap baik, juga menyerap hal yang datang belakangan. Ajaran-ajaran yang baik yang masuk ke Indonesia tidak ditolak begitu saja, tetapi dirangkul dan dijawabkan dan diintegrasikan ke dalam pandangan dunia Islam Jawa. Seperti diceritakan, dalam Serat Kancil ini terdapat tokoh yang bernama Kenthus (ayah Kancil) dan dia adalah seorang ulama atau Brahmin. Ada pula tokoh Keong yang memberikan wejangan kepada Kancil dengan mengutip ayat-ayat Al Quran juga mengajarkan ilmu ma'rifat kepada Kancil. Penulis Serat Kancil juga memunculkan nilai-nilai Islam Jawa (sufisme) tentang konsep “Manunggaling Kawula Gusti” dan “Raos Sejati” yang diajarkan oleh tokoh Srenggala.

### **Nilai-Nilai Luhur dalam Serat Kancil Kridhamartana**

*Serat Kancil Kridhamartana* merupakan karya sastra Jawa yang berbentuk tembang yang terdiri dari beberapa *pupuh*, yakni Dhandanggula, Asmaradhana, Sinom, Maskumambang, Mijil, Pangkur, Durma, Kinanthi, dan Pucung. Dalam serat tersebut terdapat nilai musyawarah yang tidak terlepas melainkan terikat dengan nilai-nilai yang lain, yakni: ketuhanan, kemanusiaan, gotong-royong dan keadilan. Berikut paparan nilai-nilai

yang terdapat dalam *Serat Kancil Kridhamartana*:

**a. Nilai Ketuhanan**

Nilai ketuhanan muncul pada *pupuh Asmaradana*, pada ke-17 hingga 20:

*Alon matur esmu nangis* (perlahan berkata agak terisak)

*marang rising budi darma* (terkait ketetapan berbuat baik)

*aduh sardula wong saleh* (wahai kau macam, kau orang saleh)

*sewu yuta panrimamba* (seribu juta terima kasihku)

*nangking panuwun amba* (tanggung rasa terima kasih saya)

*mugi kang pracayeng laku* (semoga kamu percaya pada tindakan)

*srahna dat ingkang murweng rat* (pasrahkanlah kepada Dzat yang menciptakan dunia)

*ywa mamang tindak kang yukti* (jangan ragu untuk berbuat yang pantas)

*wahyaning ngamal susila* (memunculkan perbuatan baik)

*kadarmanta kang lumeber* (alias keutaman yang mengalir)

*atas sadu pari karma* (jelas akan mendapat balasan)

*Suksma tan klimputing ga'ib* (dari sukma yang tak terluput gaib)

*ngodrat kalam bangkit molah* (sesuai kodrat perkataan Allah yang luhur)

*saking karsaning Hyang Manon* (menurut kehendak Allah)

*nulisi sagung klakuan* (yang menulis segala jenis tingkah laku)

*awon sae sinerat* (baik buruk yang telah tertulis)

*kang kadi paduka estu* (yang seperti Allah benarkan sendiri)

*aneng loh makpul tetela* (pada lauhul mahfudz nyata)

*Warah jeroning ngaka'it* (pelajaran dalam akidah Islam)

*ngamal sapinap tunapsa* (beramal itu kendaraan atau kapal (safinah)-nya diri)

*liripun klakuan sae* (maksudnya kelakuan baik)

*dados prauning sarira* (menjadi kendaraan/perahu diri)

*kapanggih ing sakarat* (yang berlabuh di alam sakaratul maut)

*wawales tikel ping satus* (akan dibalas seratus kali lipat)

*atasing basuki tama* (jelas merupakan keselamatan yang sungguh utama)

Dari bait-bait di atas, jelas nilai perbuatan baik berupa tolong-menolong segera disandarkan pada nilai ketuhanan. Yakni bahwa bahwa perbuatan baik sebenarnya juga merupakan manifestasi pengejawantahan sifat Tuhan di muka bumi ini yang telah juga ditetapkan di *lauhul mahfudz*. Dan setiap perbuatan baik pasti mendapat balasan di akhirat kelak seperti yang telah dijanjikan Allah.

Bahkan di bait-bait setelahnya di dalam *Serat Kancil* ini, kita juga dapat menemukan ungkapan dan deskripsi terkait

nilai ketuhanan yang menghargai perbedaan. Yakni sebuah nilai ketuhanan yang mengakui bahwa sebenarnya ajaran kebaikan itu pasti bersumber dari Tuhan yang sama, meskipun dalam bungkusnya kadang berasal dari label agama yang berbeda. Karena sejatinya seluruh kebaikan datang dari tuhan yang sama.

#### **b. Nilai Kemanusiaan yang (Berke)adil(an)**

Pernyataan akan seruan berbuat adil ini dalam melambri sikap saling menolong terekam dalam *pupuh* Dhandanggula (3), pada ke-15:

*lah elinga ywa tindak tan yukti* (ingat! jangan bersikap yang tidak pantas)

*kaya paran macan karepira* (gimana kok keinginanmu bisa seperti itu, macan?)

*landraten atimu dhewe* (adililah hatimu sendiri)

*tan gampang culing wuwus* (memang tidak mudah ngomong itu)

*kudu nganggo tinimbang dhisik* (harus dilambri pertimbangan)

*jroning atimu ana* (di dalam dasar hatimu)

*rembug bener luput* (pasti sudah ada panduan pertimbangan benar-salah)

*ajara budi kraharjan* (belajarlah budi keselamatan)

*potang pangan estune anagih bukti* (berhutang pangan senyatanya, malah menagih mau memakan Kerbau)

*karya anyaur karya* (perbuatan harus dibayar perbuatan yang setimpal)

Dalam seruan kerbau juga disebutkan kata adililah (*landraten*) dirimu sendiri. Adililah hatimu sendiri bermakna mendidik diri sendiri mengelola kecenderungan kebaikan yang ada dalam diri jangan sampai kalah dengan dorongan keinginan yang mengajak untuk berbuat tidak adil. Hal ini merupakan pendidikan untuk membentuk budi luhur (*ajaran budi karaharjan*) yang merupakan dasar adab, tata-krama, dan kesusilaan persis dalam kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada nilai kesamaan manusia (nilai Kemanusiaan) dikatakan agar jangan saling merendahkan. Jangan merendahkan manusia lain. Jangan pernah merasa lebih daripada yang lain, seperti tersurat dalam *pupuh* Dhandanggula (3) pada 18:

*Pasrangkara aja kumawasis* (jangan merasa paling pandai)

*lungiting sabda mung amrih murka* (tajam perkataan yang hanya memunculkan murka saja)

*iku dudu sabenere* (itu bukan yang benar)

*ngatokaken tyas palsu* (justru menampakkan kepalsuan hati)

*macihnani budi pranatis* (yang menandai budi hati seseorang)

*kumetmu nurut empyak* (pencarianmu tidak jelas layaknya menelusuri rangkap atap)  
*pajatine punggung* (sesungguhnya bodoh)

*elo kujur raganingwang* (bisa celaka diri kamu)

*ngong tetulung temahan pinenthung linggis* (saya menolong malah dipukul linggis)

*awit alaning sanak* (karena buruknya persaudaraan)

Artinya nilai kemanusiaan yang tersurat dan tersirat seperti dalam Serat Kancil ini sangat ditekankan atas dasar nilai saling menghargai, tanpa diskriminasi, tidak merendahkan yang lain, serta nilai persamaan kemanusiaan antara satu dengan yang lain.

### c. Nilai Persatuan atau Gotong Royong atau Kerjasama

Yang perlu digaris bawahi adalah nilai gotong-royong atau saling tolong-menolong yang terdapat dalam serat ini didasarkan pada nilai dan rasa welas-asih (*awit ketarik tresna sih*) karena merupakan sesama makhluk hidup. Atau minimal nilai awal ini terverbalkan dalam bait-baitnya dimana kehendak menolong Harimau didasarkan pada rasa 'kemanusiaan' sesama makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan (*gembong welas ing nala rumangsa sami, sasamining ngagesang*). Hal ini berarti nilai persatuan dan gotong-royong yang dijalankan oleh Harimau seperti digambarkan dalam serat ini juga didasarkan pada nilai kemanusiaan di satu sisi maupun nilai ketuhanan di sisi lain. Sehingga nilai persatuan dan gotong-royong dilingkupi dan melingkupi nilai-

nilai lain seperti nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

Secara eksplisit nilai gotong-royong dan tolong-menolong ini terletak dalam *pupuh Asmaradana* (2), pada ke-8:

*tuhu memitran lan mami* (sungguh Harimau bersahabat dengan aku/Kerbau)

*dunya ngakir aywa pisah* (hingga akhir dunia jangan sampai berpisah)

*dene yen sira ing tembe* (jika kamu/Harimau nantinya)

*katempuh ing pringgabaya* (menemui kesulitan dan bahaya)

*kesarin sun alangna* (yang menimpamu, aku akan bantu menghilangkan)

*lakune wong tulung tinulung* (yakni sebagai tindakan orang saling tolong-menolong)

*mamrih basukining badan* (untuk keselamatan raga)

### d. Nilai Musyawarah dan Permufakatan

Seruan bermusyawarah terdapat dalam *pupuh Durma* (8) pada ke-5 dan 6:

*heh sardula ywa ge mahyakken disura* (wahai macan jangan kau memunculkan keberanian)

*kumlungkung kumawani* (sombong dan sok berani)

*yeku salah tampa* (itu salah paham)

*dudu caraning atata* (bukan cara terhormat)

*mungguh tataning prakawis* (menurut aturan menyelesaikan permasalahan)

*kudu katimbang* (harusnya ditimbang)

*mupakat lan para lit* (setelah tercapai mufakat di antara para pimpinan sidang)

*yen wus kumpul siji panimbang nalar* (jika telah terkumpul satu pertimbangan gagasan)

*nuli dhawuhing ponis* (kemudian diputuskan *vonis*)

*teges prampungan* (artinya telah selesai)

*uga kamot ing layang* (juga dimuat dalam surat)

*nanging ares kudu mawi* (namun penahanan harus melalui)

*den sahken marang* (pengesahan oleh)

*huk nagara Batawi* (*huk nagara Batawi*)

Dalam hal ini bait-bait di atas, pencarian keputusan akan suatu masalah harus diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Yakni sebuah prosedur untuk menentukan dan memutuskan sebuah perkara. Dalam kasus proses peradilan, para pimpinan sidang (*lit*) telah bermusyawarah dengan cara mengambil keterangan dari para saksi dan komisi-komisi maupun juga keterangan dari terdakwa. Dari proses tersebut, para pimpinan hakim akhirnya memusyawarahkan dengan pimpinan lain hingga tercapai permufakatan dalam menilai suatu hal, perkara, maupun masalah (*mupakat lan para lit*).

Dasar dari permufakatan tersebut diraih dengan cara menimbang seluruh keterangan secara lengkap dari sebuah masalah atau perkara, kemudian menilai seluruh keterangan tersebut dengan pertimbangan nalar yang jernih, yakni setelah pertimbangan seluruh nalar yang

dikemukakan mencapai titik temu (*yen wis kumpul siji panimbang nalar*) alias telah mencapai mufakat, akhirnya terakhir tinggal memutuskan perkaranya (*vonis*) sesuai prinsip keadilan yang tidak memihak, alias keadilan yang merata tanpa membedakan siapa orangnya (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)

#### **e. Nilai Keadilan**

Nilai Keadilan merupakan nilai yang juga disebut di serat ini. Nilai keadilan disampaikan pada episode saat kerbau mengadukan nasibnya pada hewan Kenthus (bapaknya Kancil) karena dikejar oleh Harimau yang menuntut balas budi yang ingin memakan daging punuknya sebagai upah atas pertolongannya dulu terhadap Kerbau saat kelaparan dan kehausan. Kerbau melaporkan pada Kenthus yang merupakan hakim (*pokrul*) terkait masalahnya dan ingin meminta keadilan. Harimau yang sedang mengejar Kerbau akhirnya dibantu oleh Kuwuk mendatangi Kerbau di rumah Kenthus. Ia ingin segera menerkam Kerbau. Namun segera saja Kenthus sebagai hakim yang adil menjawab dan menyerukan akan pentingnya tindakan adil kepada Harimau. Keterangan nilai Keadilan ini disampaikan Kenthus dalam, *pupuh Pangkur* (7) pada ke-11 dan 12:

*Ingsung kang wenang masesa* (saya yang berwenang dan berkuasa)

*saisining jroning kukupan mami* (seisi dalam wilayah kekuasanku)

*lamun ana nalaripun* (jika ada keterangan argumentasinya)

*prayoga pratelakna* (sebaiknya segera jelaskanlah)

*wus lakune prakara kudu den atur* (karena jalannya perkara harus diatur)

*kamot aneng gugat jawab* (seperti termuat dalam gugat jawab)

*saha paturaning saksi* (dan juga berdasar keterangan saksi)

*Proses perbaling papriksan* (proses gugatan /*verballing* pemeriksaan)

*pra kumingsi kang wajib ngudaneni* (para komisi wajib mengerti)

*dakwa myang panangkisipun* (dakwaan maupun gugatannya)

*endi kang bener menang* (mana yang benar menang)

*marma jroning angger Nederlan kasebut* (maka dari itu di dalam hukum *nederland* disebut)

*bab kaping nenem mangkana* (bab yang keenam)

*wenang wajibing prakawis* (yang berwenang mengatur terkait kewajiban segala perkara)

Dengan jelas dalam bait-bait di atas, diterangkan bahwa setiap permasalahan harus diselesaikan secara adil. Dan proses untuk memutuskan penyelesaian masalah dengan benar harus dijalankan melalui proses pengadilan maupun peradilan yang berimbang dan adil. Dimana perlu

menimbang keterangan saksi, komisi, hingga keputusan hakim sendiri. Sederhananya, kebenaran harus diputusi tanpa memihak dan perlu mengenali duduk perkara masalah secara tepat dan menyeluruh melalui para saksi dan dewan yang menimbang agar tercapai keputusan perkara yang adil bagi semua (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Setelah menguraikan nilai-nilai yang ada dalam *Serat Kancil Kridhamartana* dapat disimpulkan bahwa setiap pengandaian nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, gotong royong, kemanusiaan, tolong menolong, dan lain-lain ternyata seperti ditunjukkan dalam serat tersebut ternyata saling mengandaikan, baik saling mengkualifikasi maupun melingkupi maupun dilingkupi dan dikualifikasikan oleh nilai-nilai yang lain.

Seperti tindakan adil, ternyata harus diandaikan tercapai tidak lain dengan cara bermusyawarah dan musyawarah harus menjadi media mencari pertimbangan nalar untuk mengenali masalah secara menyeluruh dan bijaksana (berdasar hikmat dan kebijaksanaan) agar pertimbangan adil dapat diraih (sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan). Namun begitu, tindakan adil juga harus mengandaikan nilai lain yang muncul dari pribadi atau manusia yang berbudi luhur (kemanusiaan yang mengedepankan

keadilan dan keadaban). Karena dari pribadi manusia yang telah mengalahkan dan menepis pamrih diri egoistinya, alias telah mengalahkan sikap menuruti nafsu buruk dalam dirinya, akan muncul pribadi yang tidak memihak, tidak berbuat menuruti kecenderungan yang tidak berimbang.

Dari proses menempa dan mengolah diri kemanusiaan kita tersebut akan muncul pribadi manusia—setelah mengalahkan kecenderungan buruk dalam dirinya—bisa berbuat dan menyelenggarakan prinsip tolong-menolong yang tidak lagi berpamrih diri, alias bisa mendukung kebersamaan dan gotong royong yang akan memperkuat persatuan (Sila ke-3 Persatuan Indonesia). Pribadi manusia yang telah mengolah diri menjadi manusia berbudi utama tersebut akan melahirkan sikap yang adil yang tingkah lakunya juga pasti beradab (Sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab).

Namun begitu, kebaikan dan keadilan yang dijalankan jika tanpa dasar kebaikan yang berasal dari Tuhan, akan menyebabkan prinsip tolong-menolong, bersikap adil, sikap berimbang, juga sikap mau memahami duduk perkara dengan cara jernih dan penuh pertimbangan, akan rapuh diterpa gelombang kecenderungan pamrih diri yang menggoda. Standar baik-buruk, benar-salah, adil-zalim, jika hanya mendasarkan nilai di dunia ini akan sangat mudah dikorupsi oleh standar pamrih untuk

kepentingan diri dan kelompok, dan oleh karenanya bisa melenceng dari kebenaran.

Dan dari serat ini kita bisa belajar bahwa kebenaran dan kebaikan mesti disandarkan pada nilai ketuhanan dan visi kebaikan hingga kehidupan akhir kelak yang menjadi pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan (sila ke-1, Ketuhanan yang maha Esa). Pada serat ini juga ditekankan bahwa seluruh perbuatan baik sebenarnya berasal dari tuhan yang sama, karena tuhan hanya satu (esa). Dari pemahaman ini konsep ketuhanan pasti bersanding dengan kebaikan. Konsep ketuhanan yang dalam realitasnya kadang-kadang dilabeli oleh agama yang berbeda-beda benar-benar diuji bahwa kebenaran Tuhan harus mewujudkan dalam praktik dan tindakan baik dalam wujud budi luhur dan akhlak utama. Konsep seperti inilah yang disebut sebagai ketuhanan yang “tiada egois”, alias menghargai kerberagaman orang lain. Sebuah konsep ketuhanan yang kebenarannya diuji dalam tingkah laku dan perbuatan baik serta budi luhur—meminjam istilah Soekarno, “ketuhanan yang berbudi pekerti luhur” (Soekarno, 1984: 147-154).

### **Relevansi Musyawarah**

Para pendiri bangsa ini menyusun negara menggunakan dua perspektif modern (Barat) dan budaya politik Indonesia, sebab itulah dalam perdebatan yang berujung pada konsensus kita memilih

negara modern (republik), bukan kerajaan. Namun budaya politik khas bangsa yang dicantumkan dalam konstitusi kita adalah permusyawaratan, dimana hal itu tercermin pada nama lembaga MPR. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah menjadi hal yang penting dalam rancang bangun politik Indonesia. Dalam ruang musyawarah itulah sesungguhnya sistem politik kita memiliki kewajiban moral untuk menempatkan etika politik dalam bernegara (Badrun, 2016: 6-7).

Saat ini sistem politik cenderung dikuantifikasikan sehingga kehilangan ruh budaya politik yang luhur, padahal sesungguhnya musyawarah mufakat sebagai ciri utama sistem politik Indonesia. Sukarno mengemukakan keyakinannya bahwa syarat mutlak kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan karena persoalan yang belum memuaskan dapat dibicarakan dalam permusyawaratan.

Musyawarah dalam sejarah Indonesia sesungguhnya tumbuh subur dalam tradisi budaya melayu zaman Islam meski demikian ada bahasa asli yang tumbuh subur di pulau Jawa yang disebut *urun rembug* (saling berbagi ide dalam pertemuan bersama). Tradisi ini adalah tradisi rakyat jelata dan elit ningrat untuk bermusyawarah (Badrun, 2016: 128). Kata permusyawaratan menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia dalam mengambil budaya luhur bangsa ini, lalu dikonstruksikan dan

dilembagakan dalam struktur politik oleh para pendiri bangsa. Dalam praktiknya tentu bukan sekedar persamaan kata permusyawaratan saja, melainkan proses politik yang bekerjanya lembaga MPR harus benar-benar menjalankan musyawarah dalam memutuskan dan menetapkan sejumlah *out-put* politik

Lay (2018: 74) mengutip dari Pidato Bung Karno pada sidang BPUPK 1 Juni 1945, dalam menginterpretasikan “mufakat” yang sekarang menjadi sila keempat Pancasila, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan hasil yang berasal dari proses induktif. Praktik-praktik musyawarah dalam berbagai bentuk sudah berlangsung lama di masyarakat, sehingga para pendiri bangsa hanya menggalinya dan mencari generalisasi dari bentuk tersebut yang dikenal dengan “demokrasi permusyawaratan” (demokrasi deliberatif). Musyawarah merupakan metode politik yang luas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ia merupakan praktik utama dalam proses penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan terkait kepentingan /isu publik kolektif. Musyawarah juga sebagai dasar membentuk *public reasons*. Ia bukan metode atau mekanisme seleksi guna menghasilkan pemimpin. Karena metode seleksi pemimpin dalam masyarakat nusantara berdasarkan pada model kepemimpinan ‘orang kuat’, sistem

pewarisan berdasarkan keturunan, dan ada pula sistem pemilihan terbuka.

Musyawarah sebagai salah satu perwujudan demokrasi deliberatif dan demokrasi prosedural tidak perlu untuk dipertentangkan. Walaupun keduanya bekerja dalam logika yang berbeda dan berlangsung pada aras yang berbeda. Namun, keduanya bisa menjadi satu kesatuan praksis sosial yang bekerja secara kontinu. Kita bisa menempatkan sebagai proses berkelanjutan tempat demokrasi prosedural menjadi pintu masuk bagi proses seleksi pemimpin/representasi, sementara musyawarah menjadi mekanisme pokok dalam proses pengambilan keputusan diantara para pemimpin/ representasi yang dihasilkan melalui mekanisme elektoral (Lay, 2018 :84).

Sebagai salah satu wujud dari demokrasi deliberatif, musyawarah berfungsi guna menjawab ancaman konflik atau mencapai konsensus atas kepentingan-kepentingan kolektif. Ia sekaligus menjadi proses yang memfasilitasi kontrol masyarakat atas persoalan-persoalan publik yang bertumpu pada prinsip persamaan yang menjadi inti dari demokrasi substantif (Lay, 2018:85).

Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu, demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan bukan juga demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis (hikmat kebijaksanaan) ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh mayoritas ataupun minoritas (Latif, 2011: 478).

Demokrasi permusyawaratan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang strukturnya bercorak hirarkis piramidal, dimana antar sila merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait dan mengkualifikasi. Oleh karena itu, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Notonagoro, 1967: 32).

Jadi, demokrasi permusyawaratan ini adalah demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, dengan

tujuannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kita berkaca pada sejarah pembentukan negara ini, para pendiri bangsa kita sangat menekankan pentingnya demokrasi permusyawaratan. Demokrasi permusyawaratan seperti dipahami para pendiri merupakan konsep yang lebih menekankan pada daya-daya konsesus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan.

Demokrasi permusyawaratan ini berusaha untuk mengatasi paham perseorangan dan golongan. Yang dihindari bukan saja dikte-dikte golongan mayoritas, melainkan juga dikte-dikte minoritas dari oligarki elit penguasa dan pengusaha (Latif, 2011: 463).

Menurut Latif (2011:478), dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat: *Pertama* harus didasarkan asas rasionalitas dan keadilan, bukan hanya berdasarkan subyektifitas ideologis dan kepentingan. *Kedua*, didedikasikan pada kepentingan semua orang, bukan demi kepentingan perseorangan maupun golongan. *Ketiga*, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. *Keempat*, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas dari

penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.

## PENUTUP

Konsep Demokrasi Pancasila atau demokrasi permusyawaratan yang dimaknai sebagai demokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang memuliakan nilai-nilai budi luhur kemanusiaan, serta yang menghargai perbedaan berlandaskan semangat kesetaraan dan persaudaraan, yakni dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar telah terpapar dan tertera secara eksplisit dan utuh dalam *Serat Kancil Kridhamartana* jilid I. Serat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti disebut dalam nilai-nilai Pancasila ternyata memang saling mengadaikan dan kait-mengkait satu dengan yang lain dan serat Kancil telah menunjukkan secara baik keterkaitan itu.

Jika nilai-nilai kearifan lokal Nusantara (*Serat Kancil Kridhamartana*) yang sudah terkristalisasi dalam konsep Demokrasi Pancasila benar-benar dipahami dan dipraktikkan oleh penyelenggara negara, maka niscaya kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai cita-cita demokrasi yang sesungguhnya (substansif) dapat diwujudkan karena demokrasi ini yang diidealisasikan mampu mewujudkan pemerintahan yang aspiratif dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas.

Demokrasi permusyawaratan ini adalah sebagai arena di mana segala persoalan diselesaikan melalui proses dialog (musyawarah). Dialog yang lebih menekankan substansi dan melampaui kepentingan kelompok dengan dilandasi oleh hikmat dan kebijaksanaan

## DAFTAR RUJUKAN

- Badrun, Ubedillah, 2016, *Sistem Politik Indonesia (Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bakker, Anton & Zubair, Ahmad Charris, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Behrend, T.E (ed.), 1991, *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- Carpenter, K. 1992. "Kancil: From Mischief to Moral Education Author". *Western Folklore*, Vol. 51, No. 2 (Apr., 1992), pp. 111-127.
- Ciptoprawiro, Abdullah, 1986, *Filsafat Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Damono, Sapardi Djoko, 1979, *Sosiologi Sastra sebuah Pengantar*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Dipodjojo, Asdi, 1996, *Sang Kantjil: Tokoh Tjerita Binatang Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Latif, Yudi, 2009, *Negara Paripurna*, Gramedia, Jakarta.
- Lay, Cornelis, 2018, "Musyawarah", *Prisma* (Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi), Vol. 37 No. 2, LP3ES, Jakarta.
- McKean, P.F. 1971. "The Mouse-deer ("Kantjil") in Malayo-Indonesian Folklore: Alternative Analyses and the Significance of a Trickster Figure in South-East Asia". *Asian Folklore Studies*, Vol. 30, No. 1 (1971), pp. 71-84.
- Notonagoro, 1975, *Pantjasila Ilmiah Populer, Hand-Out* Fakultas Filsafat UGM.
- Sasrawijaya, R.P 1986. *Serat Kancil jilid 1* (Pengalihaksara Sri Suhartini). Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
- Setyowati, 2006, *Analisis Nilai Moral Serat Kancil Salokadarma*, Skripsi (tidak diterbitkan), FIB-UI.
- Subhan, M., 2019, *Bangsa Mati di Tangan Politikus*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sundari, A., 2014, "Analisis Naskah Serat Kancil Amongsastra sebagai Model Pendidikan Moralitas Masyarakat", Terdapat di <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/60248>.
- Winstedt, R.O., 1906, "Some Mouse-deer Tales", *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, No. 45.
- Yulita, Sri, 2019, "Serat Wulangreh: Ajaran Keutamaan Moral Membangun Pribadi yang Luhur", *Jurnal Filsafat*, Vol.29, No. 2, Yogyakarta.